



Analisis Kebijakan Luar Negeri India dalam *Act East Policy*

Meizaro Tifira Akbar

Prodi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia;
email: meizaro17001@mail.unpad.ac.id

Nuraeni

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: nuraeni@unpad.ac.id

| Submit: 20-01-2023 | Accept: 27-01-2023 | Publish: 31-01-2023 |

Keywords

Act East Policy,
Asia-Pacific,
Foreign Policy, India, Narendra
Modi

ABSTRACT

In 2014, the Indian government under Narendra Modi decided to launch the Act East Policy as one of the country's main foreign policy orientations. This policy aims to strengthen India's bilateral and multilateral relations with Asia-Pacific countries, both politically, economically, culturally, and strategically. This study aims to analyze one of India's foreign policies, namely the Act East Policy through Kalevi J. Holsti's perspective which analyzes foreign policy based on internal and external factors of a country. This descriptive qualitative research uses data obtained from relevant primary and secondary sources. This study found that the reasons for the Indian government's launch of the Act East Policy were the rise of a new dominant power such as China, the United States' Pivot to Asia strategy, and also the Indian government's desire to accelerate development in India's relatively isolated northeastern region.

Kata Kunci

Act East Policy,
Asia-Pasifik,
Kebijakan Luar Negeri, India,
Narendra Modi

ABSTRAK

Pada tahun 2014, pemerintah India di bawah kekuasaan Narendra Modi memutuskan untuk meluncurkan *Act East Policy* sebagai salah satu orientasi kebijakan luar negeri utama dari negaranya. Kebijakan ini bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral maupun multilateral India dengan negara-negara Asia-Pasifik, baik secara politik, ekonomi, kebudayaan, maupun strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis salah satu kebijakan luar negeri India, yakni *Act East Policy* melalui perspektif Kalevi J. Holsti yang menganalisis kebijakan luar negeri berdasarkan faktor internal maupun eksternal dari suatu negara. Penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif ini menggunakan data yang didapatkan dari sumber-sumber primer maupun sekunder yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa alasan pemerintah India meluncurkan *Act East Policy* adalah bangkitnya kekuatan dominan baru seperti China, strategi “*Pivot to Asia*” dari Amerika Serikat, serta keinginan pemerintah India untuk mempercepat pembangunan di wilayah timur laut India yang relatif terisolasi.

PENDAHULUAN

Perdana Menteri India yang saat itu baru saja terpilih pada tahun 2014, Narendra Modi, mengumumkan dalam KTT India-ASEAN ke-12 yang diadakan di Myanmar pada 12 November 2014, bahwa pemerintah India telah meningkatkan *Look East Policy* menjadi *Act East Policy* (Ministry of External Affairs of India, 12 November 2014). Keesokan harinya, pada KTT Asia Timur ke-9 yang juga diselenggarakan di Myanmar, Narendra Modi kembali menyinggung *Act East Policy* dalam pidatonya, di mana beliau mengatakan bahwa selama enam bulan masa pemerintahannya, beliau sudah memprioritaskan pemerintahannya untuk mentransformasi kebijakan *Look East Policy* menjadi *Act East Policy* secara cepat, dan dalam kesempatan yang sama juga beliau menyinggung bahwa KTT Asia Timur merupakan salah satu pilar yang penting dalam kebijakan ini (Ministry of External Affairs of India, 13 November 2014).

Act East Policy memiliki prinsip dan tujuan utama berupa peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, ikatan kebudayaan, dan juga pengembangan hubungan strategis dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik melalui keterikatan yang berkelanjutan, baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral, yang kemudian menambah konektivitas ke wilayah timur laut India dengan negara-negara di sekitar India (Ministry of External Affairs of India, 16 Maret 2016). *Act East Policy* sendiri bermula dari *Look East Policy* yang diluncurkan oleh pemerintah India pada awal tahun 1990-an. Program ini didorong oleh adanya hubungan yang sudah terjalin sejak dahulu antara India dengan negara-negara di Asia-Pasifik, dan juga pesatnya pertumbuhan di bidang ekonomi, politik, keamanan, maupun demografi di kawasan Asia-Pasifik pada menjelang abad ke-21, di mana pertumbuhan pesat China menjadi hal yang paling menonjol (Ministry of External Affairs of India, 16 Desember 2014). Demi memuluskan langkah program tersebut, India menjadi Mitra Dialog Sektoral pada tahun 1992, yang kemudian ditingkatkan menjadi

Mitra Penuh dalam Forum Regional ASEAN pada tahun 1996, *Summit Level Partnership* pada tahun 2002, dan Kerja Sama Strategis India-ASEAN pada tahun 2012 (Haokip, 2011: 249-250 ; Ministry of External Affairs of India, 16 Desember 2014). Terhitung pada tahun 2018, sudah ada 30 mekanisme kelembagaan tahunan untuk dialog India-ASEAN, seperti KTT dan tujuh dialog antar kementerian sejak dimulainya kebijakan *Look East Policy* pada tahun 1992 (Ministry of External Affairs of India, 7 Februari 2018).

Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisis salah satu kebijakan luar negeri India, yakni *Act East Policy*, dan juga latar belakang dari *Act East Policy* itu sendiri melalui teori Kalevi J. Holsti yang menganalisis kebijakan luar negeri berdasarkan faktor internal maupun eksternal dari suatu negara. Selain itu, penelitian ini juga membawa kebaruan berupa analisis kerangka *Act East Policy* secara komprehensif dengan melihat latar belakang perumusan kebijakan tersebut melalui berbagai peristiwa yang terjadi di dalam negeri India maupun di luar negeri yang turut mempengaruhi India, baik secara langsung atau tidak langsung. Penelitian ini juga menelusuri peristiwa-peristiwa tersebut hingga masa kemerdekaan India pada tahun 1947.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk topik serupa, antara lain ditulis oleh Li (2015), Khadijah Md Khalid, Jason Loh Seong Wei, dan Ayame Suzuki (2015), Thongkholai Haokip (2011). Kebaruan riset ini, dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah bahwa riset ini fokus membahas *Act East Policy*, dimana akan dianalisis kebijakan luar negeri India berdasarkan faktor internal maupun eksternalnya.

KERANGKA KONSEPTUAL

Analisis kebijakan luar negeri adalah sebuah studi mengenai kegiatan maupun praktik dari hubungan antar berbagai aktor yang berbeda di dalam sistem internasional seperti negara-negara (Alden & Aran, 2017: 2-3). Analisis

kebijakan luar negeri dapat diimplemtasikan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada pemikiran yang dipakai. Pemikiran realisme menganggap bahwa nilai-nilai keamanan nasional seperti penyeimbangan kekuatan maupun penguatan peran militer nasional sangatlah penting bagi kebijakan luar negeri suatu negara, karena mereka menganggap jika sistem di dunia internasional ini bersifat anarki (Jackson & Sørensen, 2013: 252-253). Sedangkan pemikiran liberalisme sendiri menganggap bahwa demokrasi dan kebebasan merupakan nilai yang paling penting, di mana dalam hubungan internasional, mereka lebih mengutamakan hubungan multilateral seperti adanya organisasi internasional yang digunakan sebagai instrumen untuk meredam konflik dan meningkatkan kerja sama. Selain teori-teori hubungan internasional, teori-teori dari bidang lainnya juga dipakai, karena memang analisis ini dapat bersifat multidisiplin.

Kenneth Waltz dalam bukunya yang berjudul *Man, The State, and War* (1959), menjelaskan bahwa analisis kebijakan luar negeri dapat dibagi menjadi tiga tingkat analisis, antara lain tingkat individu, tingkat negara, dan tingkat sistem internasional. Sedangkan menurut Kalevi J. Holsti dalam bukunya yang berjudul *A Framework of Analysis* (1992), tiga tingkat analisis yang diajukan oleh Kenneth Waltz, meskipun memberikan kontribusi yang besar, tidak cukup untuk menjawab beberapa hal, seperti mengetahui kebijakan luar negeri suatu negara hanya dengan mempelajari sikap maupun nilai-nilai yang dianut oleh seorang menteri luar negeri dari negara tersebut (Holsti, 1992: 15-16). Holsti berpendapat bahwa perbedaan antara ketiga tingkat analisis tersebut harus diperhatikan, karena masing-masing tingkat analisis dapat melihat suatu permasalahan dengan hasil yang berbeda-beda juga. Holsti juga berpendapat bahwa kita harus memiliki pengetahuan mengenai pertimbangan ideologis, serta konfigurasi umum mengenai pengaruh, kekuatan, dominasi, dan subordinasi dari negara yang dianalisis tersebut. Masing-

masing tingkat dalam teori tingkat analisis, menurut Holsti, dapat digunakan tergantung konteks permasalahan yang dianalisis. Meskipun begitu, Holsti juga menyatakan bahwa lingkungan luar negara tidak kalah pentingnya dengan lingkungan dalam negara, di mana pernyataan ini kemudian melahirkan analisis berdasarkan faktor internal dan faktor external dari suatu negara.

Terkait dengan faktor internal, Holsti menjelaskan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Di antaranya adalah nilai, kebutuhan, dan tradisi birokratis yang melandasi suatu negara untuk meluncurkan kebijakan luar negerinya berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh negara tersebut (Holsti, 1992: 331). Selain itu, faktor berbagai kebutuhan sosial dan atribut-atribut nasional juga turut mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri di suatu negara, di mana tujuan, keputusan, maupun tindakan dari beberapa kebijakan luar negeri disusun untuk memenuhi kebutuhan sosial secara umum, dan juga bertujuan untuk memajukan kepentingan tertentu dari beberapa pihak lainnya seperti kelompok domestik, partai politik, dan juga perusahaan swasta (Holsti, 1992: 335-336). Ketidakstabilan domestik juga turut mempengaruhi para penguasa dalam mengambil kebijakan luar negeri suatu negara, di mana ketidakstabilan tersebut dapat memicu kebijakan luar negeri yang bersifat ekspansif dan juga agresif (Holsti, 1992: 337). Jenis rezim yang berkuasa di suatu negara, baik dari segi politik maupun segi ekonomi, juga turut mempengaruhi kebijakan luar negeri dari negara tersebut, dikarenakan transparansi dari suatu rezim dapat mudah atau tidaknya upaya untuk dapat memanipulasi opini publik (Holsti, 1992: 338).

Besarnya populasi dari suatu negara juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dari negara tersebut, di mana negara-negara yang berpopulasi lebih besar cenderung lebih rentan terhadap perang daripada negara-negara berpopulasi lebih kecil (Holsti, 1992: 340-341). Tingkat pembangunan di suatu negara juga

turut mempengaruhi kebijakan luar negerinya, di mana kebijakan luar negeri antara negara-negara berpenghasilan tinggi dan negara-negara berpenghasilan rendah dapat berbeda (Holsti, 1992: 341-342). Faktor opini publik ini mungkin merupakan faktor yang rumit yang dapat menentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Terlebih lagi, karakteristik dari sistem-sistem politik di setiap negara juga berbeda-beda, sehingga upaya menggenrealisasi faktor opini publik ini agak sulit, karena ada negara yang memiliki pemerintahan demokratis maupun otoriter, yang tentu saja berbeda (Holsti, 1992: 342). Namun menurut Alden & Aran, opini publik secara umum adalah sebuah istilah yang mencakup berbagai kelompok kepentingan, lobi, maupun masyarakat umum yang peduli (Alden & Aran, 2017: 72). Interaksi antara tekanan publik dan keputusan resmi juga turut mempengaruhi kebijakan luar negeri di suatu negara (Holsti, 1992: 346-347).

Terkait dengan faktor eksternal, Holsti juga menjelaskan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Diantaranya adalah tujuan dan tindakan negara lain, di mana situasi yang ada di luar negara turut mempengaruhi kebijakan luar negeri di suatu negara, yang kemudian dapat menentukan menentukan upaya perumusan kebijakan luar negeri antara dua pemerintahan negara atau lebih (Holsti, 1992: 345-346). Tren dan struktur sistem juga ikut mempengaruhi kebijakan luar negeri di suatu negara, di mana di dunia yang semakin global dan saling bergantung satu sama lain ini, berbagai pemerintahan negara di dunia ini harus saling bekerja sama dalam beberapa hal (Holsti, 1992: 349). Struktur kekuasaan dan pengaruh dalam sistem juga menyediakan sekumpulan biaya, risiko, dan juga peluang, di mana struktur dalam sistem internasional ini membatasi kemampuan yang dimiliki oleh komponen-komponen dalam sistem tersebut (Holsti, 1992: 350). Efek nilai sistemik juga turut mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, di mana nilai-nilai lokal atau nasional

yang dianut oleh sebuah negara dapat berubah seiring dengan perubahan di luar negara atau di tingkat internasional (Holsti, 1992: 351).

METODE RISET

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif cenderung bergantung pada data teks dan gambaran yang beragam dalam upaya analisis datanya (Creswell, 2014: 183). Metode ini dipilih karena kebijakan luar negeri dari suatu negara seringkali dirumuskan berdasarkan banyaknya faktor, termasuk faktor yang bersifat dinamis. Penelitian ini akan menjelaskan secara runut mengenai *Act East Policy* beserta latar belakangnya.

Penelitian ini menggunakan satu teknik pengumpulan data, yaitu pengumpulan dokumen. Alasan pemilihan teknik tersebut adalah adanya relevansi terhadap tema yang dipilih oleh peneliti, di mana sumber-sumber primer seperti dokumen-dokumen terkait objek penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil analisisnya. Dalam proses pengumpulan datanya, peneliti melakukan studi literatur dokumen tersebut. Jenis-jenis dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber primer, seperti *blueprint* maupun dokumen-dokumen resmi yang masih berkaitan dengan kerangka *Act East Policy*-nya India ini. Sumber-sumber yang bersifat sekunder juga digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data-data yang tidak didapatkan dari sumber-sumber primer yang telah digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Kebijakan Luar Negeri India secara Umum

Sejak India meraih kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1947, kebijakan luar negeri India cenderung bersifat non-blok. Orientasi kebijakan luar negeri tersebut yang dimulai sejak Perdana Menteri India yang pertama, Jawaharlal Nehru, pertama kali terlihat pada upaya beliau dalam menyelenggarakan *Asian Relations Conference* pada tahun 1947, yang kemudian menjadi wadah bagi para pejuang

kemerdekaan di kawasan Asia untuk memupuk kerja sama dalam menghadapi kekuatan para penjajah (Muni & Mishra, 2019: 79). Sikap non-blok dari pemerintah India sendiri semakin terlihat pada keterlibatannya dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung (Indonesia) pada tahun 1955, di mana tujuan dari konferensi tersebut adalah memupuk dukungan dari negara-negara di kawasan Asia dan Afrika yang tidak terlalu berpihak pada salah satu dari dua kekuatan adidaya pada saat Perang Dingin terjadi, seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet (Naidu, 2004: 333-334). Sikap non-blok dari India ini menjadi semakin mantap setelah pemerintah India turut serta dalam pembentukan Gerakan Non-Blok pada tahun 1961, bersama dengan Indonesia, Yugoslavia, Mesir, dan Ghana (Kugiel, 2017: 42).

Namun sikap non-blok dari pemerintah India mulai goyah pada tahun 1962, ketika pemerintah India di bawah kekuasaan Jawaharlal Nehru memutuskan untuk meminta bantuan militer kepada Amerika Serikat, ketika India berperang melawan China dalam memperebutkan wilayah-wilayah yang dipersengketakan oleh kedua negara (McGarr, 2013: 167-168). Perang tersebut akhirnya dimenangkan oleh China, di mana wilayah Aksai Chin akhirnya dikuasai oleh China (Frankel, 2020: 274). Sikap non-blok dari India juga semakin goyah, ketika pemerintah India di bawah kekuasaan Indira Gandhi memutuskan untuk mempererat hubungan bilateralnya dengan Uni Soviet pada tahun 1971, yang ditandai oleh penandatanganan suatu traktat bersama (Michael, 2013: 40). Penandatanganan traktat tersebut dipicu oleh kunjungan salah satu pejabat tinggi Amerika Serikat, Henry Kissinger, ke China pada tahun 1971, serta kunjungan Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, ke China pada tahun 1972 (Garver, 2016: 296-299). Kedua kunjungan tersebut pada akhirnya dapat memulihkan dan mempererat hubungan bilateral China – Amerika Serikat.

Pada tahun 1976, hubungan bilateral antara India dan China juga mengalami normalisasi,

yang ditandai oleh penunjukan K. R. Narayanan sebagai Duta Besar India untuk China (Muni & Mishra, 2019: 141). Pemerintah India juga semakin memperhatikan hubungannya dengan negara-negara disekitarnya, terlebih lagi setelah invasi Uni Soviet ke Afganistan pada tahun 1979 (Michael, 2013: 59-60). Hal itu kemudian ditandai oleh keterlibatan India dalam pendirian dan pengembangan SAARC yang didirikan pada tahun 1985, di mana negara-negara Asia Selatan seperti India menjadi anggotanya. Pada tahun 1980an, pemerintahan Indira Gandhi mencetuskan suatu doktrin baru, di mana kawasan Asia Selatan dianggap sebagai wilayah pengaruh India secara eksklusif (Kugiel, 2017: 47).

Berbagai masalah global, antara lain perang di Timur Tengah, telah memicu berbagai permasalahan ekonomi di India, seperti membengkaknya hutang, jatuhnya nilai mata uang, menipisnya cadangan devisa, inflasi yang tinggi, dan terjadinya defisit perdagangan (Muni & Mishra, 2019: 155). Untuk mengatasinya, antara lain, pemerintah India mengalihkan fokusnya ke kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara yang perekonomiannya tumbuh pesat pada tahun 1990an (Grare, 2001: 120). Terlebih lagi beberapa negara yang terletak di wilayah tersebut juga memiliki kekayaan alam berupa minyak bumi dan juga pangsa pasar yang besar, seperti Myanmar, Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Australia. Faktor-faktor tersebut kemudian mendorong peningkatan aktivitas diplomatis India di kawasan tersebut (yang kemudian dinamakan sebagai *Look East Policy*), di mana pada Januari 1992, India menjadi mitra dialog sektoral ASEAN yang membahas tentang investasi, pariwisata, perdagangan, teknologi, dan ilmu pengetahuan (Michael, 2013: 146).

Pada tahun 1996, India menjadi anggota penuh Forum Regional ASEAN (ARF). ARF adalah forum utama untuk kerja sama keamanan di kawasan Asia-Pasifik, di mana forum tersebut membahas soal masalah keamanan di tingkat regional dan global, serta isu-isu yang berkaitan soal non-proliferasi dan

perlucutan senjata (Haokip, 2011: 249). Keanggotaan ARF tersebut sangat berarti, karena India akhirnya dapat memiliki daya tawar yang sejajar di kawasan Asia-Pasifik dengan segelintir kekuatan adidaya seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia (Desai, 18 November 2017). Pemerintah India pun sangat memanfaatkan keanggotaannya di ARF ini, di mana mereka dapat menyakinkan negara-negara ASEAN untuk mempertahankan hubungannya dengan India setelah hubungan antara India dengan komunitas internasional secara umum dan negara-negara ASEAN secara khusus sempat memburuk, karena India melakukan uji coba senjata nuklirnya pada tahun 1998.

Act East Policy

Pada tahun 2014, Perdana Menteri India, Narendra Modi mengumumkan dalam KTT India-ASEAN ke-12 yang diadakan di Myanmar pada 12 November 2014, bahwa pemerintah India telah meningkatkan *Look East Policy* menjadi *Act East Policy* (Ministry of External Affairs of India, 12 November 2014). Keesokan harinya, pada KTT Asia Timur ke-9 yang juga diselenggarakan di Myanmar, Narendra Modi kembali menyinggung *Act East Policy* dalam pidatonya, di mana beliau mengatakan bahwa selama enam bulan masa pemerintahannya, beliau sudah memprioritaskan pemerintahannya untuk mentransformasi kebijakan *Look East Policy* menjadi *Act East Policy* secara cepat, dan dalam kesempatan yang sama juga beliau menyinggung bahwa KTT Asia Timur merupakan salah satu pilar yang penting dalam kebijakan ini (Ministry of External Affairs of India, 13 November 2014). Sebelumnya, *Act East Policy* sudah pernah disinggung oleh Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj, dalam kunjungannya ke Vietnam pada bulan Agustus 2014, di mana beliau mengatakan bahwa pemerintahan Modi akan mengeluarkan kebijakan *Act East Policy*, karena “*Look East*” saja tidak cukup (The Economic Times, 26 Agustus 2014). Juru bicara dari Kementerian

Luar Negeri India, Syed Akbaruddin, mengatakan bahwa kunjungan dari Menteri Swaraj tersebut merupakan bagian dari penerapan *Act East Policy*, dan beliau menambahkan bahwa pemerintahan Modi akan memperluas cakupan dari kebijakan tersebut hingga jauh ke timur, di mana kawasan ASEAN menjadi fokus utamanya.

Act East Policy sendiri menekankan kerja sama India-ASEAN di bidang infrastruktur, manufaktur, perdagangan, tata kota, keterampilan, program *Make in India*, *Smart Cities*, dan program lainnya yang mendukung kebijakan domestik India. Beliau juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *Act East Policy* ini adalah mendorong kerja sama ekonomi, menjalin ikatan antar kebudayaan, dan mengembangkan hubungan strategis dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik secara berkelanjutan, baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral, di mana hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan konektivitas di kawasan timur laut India, salah satu kawasan yang menjadi prioritas dalam *Act East Policy*. Peningkatan konektivitas kawasan timur laut India dengan ASEAN, baik dari segi kebudayaan, perdagangan, infrastruktur fisik, hubungan antar masyarakat, dan lain sebagainya, sudah direncanakan, baik di tingkat multilateral maupun regional. Pemerintah India di bawah kekuasaan Narendra Modi juga sudah meminta para diplomat senior India untuk menjadikan India sebagai aktor utama ketimbang sebagai kekuatan penyeimbang saja (Muni & Mishra, 2019: 108).

Sejak *Act East Policy* diumumkan secara resmi pada tahun 2014, sudah banyak kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah India terkait dengan kebijakan luar negerinya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh V. K. Singh di Lok Sabha pada 23 Desember 2015, pemerintah India sudah memperkuat hubungannya dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, serta berupaya untuk menjalin lebih erat dan meningkatkan kemitraan strategisnya dengan negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Jepang,

Australia, Singapura, Korea Selatan, dan juga organisasi internasional seperti ASEAN (Ministry of External Affairs of India, 23 Desember 2015). Pemerintah India juga semakin aktif terlibat dalam forum-forum regional seperti *East Asia Summit*, *ASEAN Regional Forum* (ARF), *Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation* (BIMSTEC), *Asia Cooperation Dialogue* (ACD), *Mekong Ganga Cooperation* (MGC), dan *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Upaya pemerintah India dalam meningkatkan konektivitas di kawasan timur laut India yang meliputi sektor perdagangan, kebudayaan, hubungan antar masyarakat, dan infrastruktur fisik (bandara, jalan, listrik, telekomunikasi, dll.) juga semakin aktif, seperti *Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project*, Proyek Jalan Raya Trilateral India-Myanmar-Thailand, Proyek Jalan Rhi-Tiddim, *Border Haats* (pasar di kawasan perbatasan), dan lain-lain.

Hubungan antara pemerintah India dengan ASEAN menjadi lebih jelas setelah diadopsinya *ASEAN-India Plan of Action* untuk periode tahun 2016-2020 pada 5 Agustus 2015, di mana rencana aksi ini menjelaskan soal prioritas maupun langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah India maupun ASEAN dalam upaya untuk meningkatkan dan memperdalam hubungan di bidang politik-keamanan, ekonomi, maupun sosial budaya dari kedua belah pihak, demi mewujudkan berbagai potensi dari kemitraan strategis antara India dan ASEAN di bidang-bidang yang memiliki persamaan kepentingan (Association of Southeast Asian Nations, 5 Agustus 2015). Rencana aksi ini juga menjelaskan soal upaya India-ASEAN dalam kerjasamanya untuk mendukung proses pembangunan dan integrasi Komunitas ASEAN setelah tahun 2015, demi terwujudnya kohesi politik, perekonomian yang terintegrasi, pengurangan kesenjangan pembangunan, peningkatan konektivitas di kawasan ASEAN, serta terwujudnya ASEAN yang berbasis pada aturan, berorientasi pada rakyat, bertanggung jawab secara sosial, dan berpusat pada rakyat. Kerja sama ASEAN dan

India ini diupayakan dapat sesuai dengan hukum internasional maupun hukum, peraturan, dan kebijakan domestik dari negara-negara yang terlibat, di mana kebijakan ini dijalankan berdasarkan tujuh pilar yang sudah ditentukan dalam Rencana Aksi, diantaranya adalah Kerja Sama Politik-Keamanan, Kerja Sama Ekonomi, Kerja Sama Sosio-Kebudayaan, Inisiatif untuk Integrasi ASEAN dan Upaya Memperkecil Kesenjangan Pembangunan, Konektivitas, Penguatan Sekretariat ASEAN, dan Mekanisme Implementasi.

Demi memuluskan pelaksanaan *Act East Policy*, sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah India, seperti misi diplomatik penuh India untuk ASEAN beserta duta besarnya tersendiri yang didirikan pada tahun 2013 di Jakarta (Indonesia), yang bertujuan untuk mengoordinasikan kegiatan diplomatik India di kawasan tersebut (Muni & Mishra, 2019: 210). Selain itu, pemerintah India juga turut mengadakan *Forum for India-Pacific Islands Cooperation* (FIPIC) yang sudah diadakan di Suva (Fiji) pada November 2014 dan Jaipur (India) pada 21 Agustus 2015, di mana forum ini dihadiri oleh 14 negara di kawasan Pasifik. *Indo-Cambodian (Kampuchea) Joint Commission* juga kembali diadakan di New Delhi (India) pada Juli 2016, setelah sepuluh tahun tidak diadakan. Pemerintah India juga semakin banyak mengadakan kunjungan kerja ke negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, di mana Narendra Modi sendiri sudah mengunjungi 12 negara di kawasan tersebut sebanyak 25 kali pada tahun 2014-2018 (Muni & Mishra, 2019: 209).

Selain upaya-upaya diplomatis, pemerintah India juga memberikan bantuan langsung kepada proyek-proyek pembangunan di beberapa negara ASEAN, seperti penawaran kredit sebesar 1 miliar USD untuk meningkatkan konektivitas fisik dan digital antara India dengan ASEAN (Ministry of External Affairs of India, 2 Februari 2017). Pemerintah India dan ASEAN juga merintis beberapa proyek unggulan, diantaranya adalah didirikannya Pusat Pelacakan, Telemetri dan

Penerimaan Data, serta Fasilitas Pemrosesan Data di dekat Kota Ho Chi Minh di Vietnam. Selain itu, dalam rangka *Act East Policy*, pemerintah India juga memberikan berbagai bantuan proyek dan program-program lainnya di Vietnam, Kamboja, Laos, Fiji, Papua Nugini, Niue, Vanuatu, Mikronesia, dan negara-negara lainnya di kawasan Asia-Pasifik. Selain proyek-proyek yang sudah disebutkan sebelumnya, pemerintah India juga *Act East Policy* semakin diperkuat melalui *ASEAN-India Commemorative Summit* yang diadakan di New Delhi (India) pada 25 Januari 2018, di mana KTT yang merayakan 25 tahun Hubungan Dialog ASEAN-India dengan tema "Nilai Bersama, Nasib Bersama" yang kemudian melahirkan Deklarasi Delhi, para pemimpin India dan ASEAN sepakat untuk semakin memperkuat dan memperdalam Kemitraan Strategis ASEAN-India demi keuntungan bersama, di seluruh spektrum kerja sama politik-keamanan, ekonomi, sosial budaya dan pembangunan, untuk membangun sebuah komunitas yang damai, harmonis, saling peduli, dan saling berbagi di kedua wilayah tersebut (Ministry of External Affairs of India, 13 Desember 2018).

Pemerintah India di bawah kekuasaan Narendra Modi juga mencetuskan visi Keamanan dan Pertumbuhan untuk Semua di Wilayah (SAGAR) pada tahun 2015, di mana visi ini menitikberatkan pada berbagai upaya kerja sama demi pemberdayaan laut yang berkelanjutan, serta menyediakan kerangka kerja untuk menciptakan wilayah maritim yang aman, terjamin, dan stabil di kawasan Indo-Pasifik (Ministry of External Affairs of India, 8 Agustus 2021). Visi SAGAR ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh pemerintah India pada KTT Asia Timur tahun 2019, dengan memperkenalkan *Indo-Pacific Oceans' Initiative* (IPOI) yang memiliki tujuh pilar, yaitu Ekologi Maritim; Sumber Daya Maritim; Peningkatan Kapasitas dan Berbagi Sumber Daya; Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana; Kerjasama Sains, Teknologi dan Akademik; dan Konektivitas Perdagangan dan

Transportasi Maritim. Kawasan Indo-Pasifik sendiri dilewati oleh lebih dari 50 persen aktivitas perdagangan dunia yang bernilai lebih dari 62 persen dari Produk Domestik Bruto Global (Ministry of External Affairs of India, 6 Juli 2021). Sedangkan aktivitas perdagangan India dengan negara-negara di kawasan timur Selat Malaka juga semakin meningkat, di mana pada tahun 2020, nilai perdagangan India dengan kawasan ASEAN adalah sebesar 87 miliar USD, dengan China sebesar 82 miliar USD, dengan Jepang dan Korea Selatan sebesar 38 miliar USD, serta dengan Australia sebesar 13 miliar USD.

Dengan adanya situasi yang seperti itu, selain upaya-upaya pembangunan konektivitas yang sudah disebutkan sebelumnya, pemerintah India juga berupaya untuk membantu proyek pembangunan Pelabuhan Chahbahar di Iran, membuat rencana untuk memperpanjang Proyek Jalan Raya Trilateral India-Myanmar-Thailand hingga ke Kamboja, Laos, dan Vietnam, dan juga mengeksplorasi berbagai upaya untuk meningkatkan konektivitas antara Kepulauan Andaman-Nikobar di India dengan Pulau Sabang di Indonesia (Ministry of External Affairs of India, 18 Maret 2021). Narendra Modi juga mengatakan dalam pidatonya di *Shangri La Dialogue* yang diadakan di Singapura pada 1 Juni 2018, bahwa konektivitas sangatlah penting, karena perannya yang lebih dari sekadar memajukan perdagangan dan kemakmuran, tapi juga dapat menyatukan kawasan (Ministry of External Affairs of India, 1 Juni 2018). Beliau juga menambahkan bahwa upaya untuk membangun konektivitas ini tidak hanya dilakukan dengan membangun infrastruktur, tapi juga membangun rasa saling percaya dari pihak-pihak yang terlibat.

Faktor Internal Perumusan *Act East Policy*

Faktor internal dari suatu negara biasanya memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan kebijakan luar negeri di negara tersebut. Dalam konteks *Act East Policy*, peneliti menemukan beberapa faktor yang

barangkali turut mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut, berdasarkan situasi di dalam negeri India beberapa tahun sebelum peluncuran *Act East Policy*. Diantaranya adalah faktor geografis seperti terbatasnya akses maritim India ke kawasan Asia-Pasifik oleh keberadaan Semenanjung Malaya serta berbagai pulau yang terletak di wilayah Indonesia dan Malaysia, sehingga India harus mengandalkan sedikit akses maritim yang tersedia, terutama Selat Malaka yang berfungsi sebagai pintu gerbang maritim India menuju Laut China Selatan dan Pasifik Barat. Terlebih lagi, lebih dari 50 persen perdagangan maritim India juga melewati Selat Malaka di mana perdagangan maritim ini melibatkan kegiatan mengekspor barang-barang yang diproduksi di India maupun mengimpor sumber daya alam yang diperlukan oleh India (Bajpae, 2017: 359-360). Selain itu, akses menuju wilayah timur laut India juga terbatas, di mana wilayah timur laut India hanya terhubung dengan wilayah India lainnya melalui wilayah kecil bernama Koridor Siliguri, yang terletak dekat dengan perbatasan Bangladesh, China, Nepal, dan Bhutan (Singh, 7 November 2021). Kondisi geografis tersebut, ditambah dengan kebijakan isolasionisme-nya Myanmar yang berjalan selama beberapa dekade, membuat wilayah timur laut India menjadi kurang berkembang.

Oleh karena adanya faktor geografis tersebut, pemerintah India di bawah kekuasaan PM Modi memutuskan untuk membuat serangkaian kebijakan yang berkaitan dengan Selat Malaka maupun Koridor Siliguri tersebut, di mana kebijakan itu dibuat setelah *Act East Policy* diluncurkan. Terkait dengan Selat Malaka, pemerintah India telah melakukan banyak upaya untuk mengintegrasikan kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, salah satunya adalah dengan memperkenalkan *Indo-Pacific Oceans' Initiative* (IPOI) pada KTT Asia Timur tahun 2019, di mana inisiatif yang dibuat berdasarkan visi SAGAR ini memiliki tujuh pilar, yaitu Ekologi Maritim; Sumber

Daya Maritim; Peningkatan Kapasitas dan Berbagi Sumber Daya; Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana; Kerjasama Sains, Teknologi dan Akademik; dan Konektivitas Perdagangan dan Transportasi Maritim (Ministry of External Affairs of India, 8 Agustus 2021). Terkait dengan wilayah timur laut India, pemerintah India telah membuat serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mengembangkan kawasan tersebut, baik dalam sektor perdagangan, kebudayaan, hubungan antar masyarakat, maupun infrastruktur fisik, seperti bandara, jalan, listrik, telekomunikasi, dan lain sebagainya (Ministry of External Affairs of India, 23 Desember 2015). Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian diwujudkan dalam *Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project*, Proyek Jalan Raya Trilateral India-Myanmar-Thailand, Proyek Jalan Rhi-Tiddim, *Border Haats* (pasar di kawasan perbatasan), dll.

Salah satu faktor internal yang disinggung oleh Holsti adalah faktor berbagai kebutuhan sosial dan atribut-atribut nasional (Holsti, 1992: 335-336). Dalam konteks *Act East Policy*, hal itu dapat terlihat pada upaya yang dilakukan oleh PM Modi beserta Partai BJP untuk menetapkan kepemilikannya atas kebijakan tersebut. Salah satunya adalah klaim yang dibuat oleh Sushma Swaraj, Menteri Luar Negeri India di bawah Kabinet PM Modi yang sebelumnya memimpin kelompok oposisi yang didominasi oleh BJP, di mana beliau mengklaim bahwa beliau mendorong Hillary Clinton¹ yang mengunjungi India pada tahun 2011 terkait aspek "*Act East*" dari Look East Policy, ketika mereka berbicara tentang peran India yang semakin berkembang di Asia, serta fokusnya yang secara alami beralih ke kawasan Asia Timur dan Tenggara (Muni & Mishra, 2019: 204). Dalam kesempatan yang sama juga, Sushma Swaraj mengklaim bahwa kepemimpinan BJP sebelumnya di bawah pimpinan PM Vajpayee telah membentuk ulang

¹ Hillary Clinton menjabat sebagai Sekretaris Negara AS pada tahun 2009-2013

kebijakan luar negeri India terkait dengan kebijakan *Look East Policy* ini. Beberapa tahun kemudian, beliau menjadi salah satu pihak pertama di kabinet Modi yang menyinggung soal kebijakan *Act East Policy*. Upaya untuk mengklaim kebijakan *Act East Policy* ini juga dilakukan oleh PM Modi, di mana beliau mengklaim dalam pidatonya di Singapura pada 23 November 2015, bahwa dalam 18 bulan terakhir, pemerintahannya telah berinteraksi lebih banyak di kawasan Asia-Pasifik ketimbang wilayah-wilayah lainnya di dunia (Ministry of External Affairs of India, 23 November 2015).

Ketidakstabilan domestik India, terutama di sekitar kawasan timur lautnya, juga sedikit banyak mempengaruhi perumusan *Act East Policy*, di mana berbagai aktivitas pemberontakan yang di kawasan tersebut sudah berlangsung sejak beberapa dekade belakangan (Muni & Mishra, 2019: 212-213). Selain itu, kawasan timur laut India juga dekat dengan kawasan “Segitiga Emas” di sekitar perbatasan Myanmar, Kamboja, Thailand, dan Laos, yang menjadi basis produksi opium dan menyeludupkan senjata (Haokip, 2011: 241-242). Faktor-faktor tersebut serta korupsi yang menjamur di kawasan tersebut juga menghambat proses pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, dalam kesempatan tanya jawab di Lok Sabha pada 23 Desember 2015, V. K. Singh menjelaskan bahwa di dalam *Act East Policy*, peningkatan konektivitas kawasan timur laut India dengan wilayah ASEAN menjadi prioritas utama, di mana peningkatan konektivitas tersebut mencakup segi kebudayaan, perdagangan, infrastruktur fisik, hubungan antar masyarakat, dan lain sebagainya, baik dalam tingkat multilateral maupun regional (Ministry of External Affairs of India, 23 Desember 2015).

Jika kita mengingat kembali dengan salah satu teori analisis kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh Holsti, maka faktor besarnya populasi dari suatu negara juga turut mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri di negara tersebut, di mana negara-

negara yang berpenduduk lebih besar cenderung lebih rentan terhadap perang daripada negara-negara berpenduduk lebih kecil (Holsti, 1992: 340-341). Terkait dengan faktor ini, baik besarnya penduduk India maupun China juga turut mempengaruhi pembentukan *Act East Policy* ini, di mana faktor dari berbagai tindakan pemerintah China akan dibahas di faktor eksternal dari kebijakan *Act East Policy*. India sendiri memiliki penduduk sebesar 1,41 miliar jiwa pada tahun 2021, dan China memiliki penduduk sebesar 1,43 juta jiwa pada tahun 2021 (Our World in Data, 4 Oktober 2022). Faktor besarnya populasi dari suatu negara juga disinggung oleh PM Narendra Modi dalam pidatonya di *Shangri La Dialogue* yang diadakan di Singapura pada 1 Juni 2018, di mana beliau mengatakan bahwa bangsa India yang memiliki lebih dari 800 juta pemuda tahu bahwa masa depan mereka dijamin oleh besarnya ekonomi India maupun kedalaman India dalam keterlibatan mereka di tingkat global (Ministry of External Affairs of India, 1 Juni 2018). Faktor-faktor besarnya populasi itulah yang barangkali turut mempengaruhi pembentukan *Act East Policy*.

Faktor tingkat pembangunan suatu negara juga disebut juga oleh Holsti, di mana kebijakan luar negeri antara negara-negara berpendapatan tinggi dan negara-negara berpendapatan rendah bisa berbeda (Holsti, 1992: 341-342). Dalam konteks *Act East Policy* ini, tingkat pembangunan India, terutama perekonomiannya, cukup mempengaruhi pembentukan dari kebijakan ini, di mana perekonomian India pada saat diluncurkannya *Look East Policy* pada tahun 1992-1993 lalu baru saja pulih setelah dilanda krisis ekonomi pasca Perang Teluk yang terjadi pada tahun 1990-1991, runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, dan pertumbuhan ekonomi India yang stagnan karena penerapan kebijakan ekonomi sosialis sejak kemerdekaan India pada tahun 1947, sehingga pada akhirnya mendorong pemerintah India untuk melakukan reformasi di bidang perekonomian secara besar-besaran, seperti mempermudah izin bisnis di India serta

membolehkan pihak swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian India (Haokip, 2011: 241-244). Selain itu dari segi politik, India telah melalui berbagai krisis politik, di mana hasil pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 1989 dan 1991 tidak menghasilkan suara mayoritas yang cukup untuk membentuk kabinet satu partai. Sedangkan perekonomian India pada tahun 2014 cenderung tumbuh dengan pesat sebesar lebih dari 6 persen, dan juga menguasai pangsa pasar global sebesar 1,5 persen (Muni & Mishra, 2019: 206). Sedangkan dari segi politik, India sudah lebih stabil, di mana pemilihan umum India tahun 2014 dimenangkan oleh BJP, dan pemerintahan dapat dibentuk tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, di mana BJP mendapatkan 282 dari 543 kursi di Lok Sabha (Singh, 20 Mei 2014).

Faktor lainnya yang juga disinggung Holsti adalah jenis rezim yang berkuasa di suatu negara, baik dari segi politik maupun segi ekonomi, di mana faktor ini juga turut mempengaruhi kebijakan luar negeri dari negara tersebut (Holsti, 1992: 338). Terkait dengan faktor ini, kebijakan dalam negeri maupun luar negeri oleh pemerintah India di bawah kekuasaan Perdana Menteri Narendra Modi ini cenderung agak berbeda dari para pendahulunya, di mana pemerintahan beliau ini cenderung meninggalkan tradisi India dalam menjalankan kebijakan luar negerinya yang cenderung non-blok, dan cenderung lebih bersikap realis dan pragmatis. Hal itu terlihat pada keputusan Perdana Menteri Modi untuk tidak menghadiri KTT Non-Blok yang diadakan di Bolivia pada tahun 2016, di mana hal itu dianggap sebagai kepergian dari doktrin non-blok yang sudah dijalankan oleh pemerintah India sejak pemerintahan Perdana Menteri Nehru dalam perumusan kebijakan luar negerinya (Ganguly, 2017: 132). Sisi pragmatis dari pemerintahan PM Modi ini semakin terlihat dalam sikapnya kepada pembentukan kebijakan luar negeri India, di mana pemerintah India menjadi lebih rela untuk mempererat kerja sama dalam bidang politik maupun strategis dengan negara-negara yang dianggap

berseberangan dengan China, seperti pembentukan dialog strategi informal bernama *Quad* yang beranggotakan India, AS, Australia, dan Jepang pada November 2017 (Muni & Mishra, 2019: 231-233). Bahkan sisi pragmatis dari Narendra Modi ini juga tercermin dari karakter pribadinya, di mana beliau tidak menunjukkan kebenciannya pada Pemerintah AS yang pernah mencekal dirinya karena dianggap terlibat dalam Kerusuhan Gujarat tahun 2002, dan beliau tetap berfokus untuk menjalin hubungan bilateral Amerika Serikat-India menjadi lebih dekat, karena Amerika Serikat sendiri sudah dianggap sebagai sekutu alami India oleh beliau (Kumar, 7 Mei 2015). Narendra Modi sendiri juga mengatakan bahwa pemerintahnya bekerja sama dengan pemerintah China di tingkat internasional, namun bila berkaitan dengan perdagangan dan perekonomian, maka China adalah pesaing bagi India.

Faktor Eksternal Perumusan *Act East Policy*

Dalam suatu kebijakan luar negeri, tentu kebijakan tersebut tidak lepas juga dari faktor eksternal, yakni faktor-faktor yang berasal dari luar wilayah negara yang turut mempengaruhi dibentuknya kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam konteks *Act East Policy*, faktor-faktor eksternal ini sudah dijelaskan oleh Sekretaris (Timur) di Kementerian Luar Negeri India, pada 13 Desember 2014 dalam “*International Relations Conference on ‘India’s Look East - Act East Policy: A Bridge to the Asian Neighbourhood’*” yang diadakan di Pune (India), di mana beliau mengatakan bahwa terwujudnya *Act East Policy* ini turut dipengaruhi oleh beberapa peristiwa, diantaranya adalah bangkitnya kekuatan dominan baru seperti China, strategi “*Pivot to Asia*” dari Amerika Serikat, serta arsitektur ekonomi dan strategis regional yang berusaha untuk mengikuti arus multilateralisme yang kuat (Ministry of External Affairs of India, 16 Desember 2014).

Terkait dengan bangkitnya kekuatan dominan baru seperti China, pemerintah China

memang belakangan ini semakin gencar dalam menjalankan salah satu kebijakan luar negerinya seperti *One Belt One Road* (OBOR) yang kemudian berganti nama menjadi *Belt and Road Initiative* (BRI), di mana kebijakan yang diluncurkan pada tahun 2013 ini berusaha untuk melakukan ekspansi menuju wilayah barat China, termasuk kawasan Samudera Hindia, dengan melakukan kerja sama, investasi, memberikan pinjaman, dan juga memberi bantuan kepada negara-negara yang terlibat, berupa pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk mempermudah konektivitas, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan perdagangan, dan lain sebagainya (The World Bank, 29 Maret 2018). Aktivitas militer China di kawasan Laut China Selatan juga semakin meningkat, di mana upaya klaim wilayah beserta pelanggaran batas perairan teritorial dari China ini telah mendapatkan tanggapan yang semakin vokal dari pemerintah India dalam beberapa tahun belakangan. Diantaranya adalah pidato yang dibacakan oleh Narendra Modi di KTT India-ASEAN ke-12 yang diadakan di Myanmar pada 12 November 2014, di mana beliau mengingatkan bahwa setiap pihak yang terlibat di persengketaan wilayah Laut China Selatan harus mengikuti norma dan hukum internasional, seperti menaati Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS), mengimplementasikan Pedoman Deklarasi Perilaku 2002 dan Kode Etik di Laut China Selatan, serta menyelesaikan masalah sengketa tersebut berdasarkan konsensus (Ministry of External Affairs of India, 12 November 2014b).

Hal itu kemudian kembali ditegaskan dalam Deklarasi Delhi pada 25 Januari 2018, yang bertuliskan:

"6. Reaffirm the importance of maintaining and promoting peace, stability, maritime safety and security, freedom of navigation and overflight in the region, and other lawful uses of the seas and unimpeded lawful maritime commerce and to promote peaceful

resolutions of disputes, in accordance with universally recognised principles of international law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), and the relevant standards and recommended practices by the International Civil Aviation Organization (ICAO) and the International Maritime Organization (IMO). In this regard, we support the full and effective implementation of the Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC) and look forward to an early conclusion of the Code of Conduct in the South China Sea (COC)." (Ministry of External Affairs of India, 25 Januari 2018).

Isu mengenai bangkitnya pengaruh China ini kembali disinggung dalam sesi tanya jawab di Rajya Sabha² pada 13 Desember 2018, di mana V. K. Singh selaku Menteri Negara di Kementerian Luar Negeri India, menjawab pertanyaan dari salah satu anggota parlemen, Shri Jose K. Mani, mengenai gagasan dari para diplomat China di India mengenai sinergi antara OBOR dengan *Act East Policy*, maupun rencana pemerintah India dalam menanggapi gagasan tersebut. V. K. Singh kemudian mengatakan:

"Government has seen such reports. With regard to China's 'One Belt One Road' (OBOR) initiative, Government has publically articulated its firm belief that connectivity initiatives must be based on universally recognized international norms, good governance, rule of law, openness, transparency and financial responsibility, and must be pursued in a manner that respects sovereignty, equality and territorial integrity of nations. The inclusion of the so-called 'China-Pakistan Economic Corridor' (CPEC), which passes through parts of the Indian state of Jammu & Kashmir under illegal occupation of Pakistan, as a flagship project of 'OBOR' reflects lack of appreciation of India's concerns on the issue of sovereignty and territorial integrity. Government has conveyed to the Chinese side, including at the highest level, its concerns about their activities in Pakistan

² Rajya Sabha adalah salah satu lembaga legislatif di India, serupa dengan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia

Occupied Jammu & Kashmir and asked them to cease these activities." (Ministry of External Affairs of India, 13 Desember 2018).

Terkait dengan strategi *Pivot to Asia* yang diusung oleh Amerika Serikat, Barack Obama yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2009-2017 ini mendorong terwujudnya *Pivot to Asia*, di mana kebijakan ini merupakan upaya pemerintah Amerika Serikat untuk menghadapi bangkitnya China sebagai kekuatan adidaya. Presiden Obama percaya bahwa bangkitnya China beserta pengaruhnya memerlukan perlakuan khusus, dan beliau juga merasa bahwa kawasan Asia dapat menjadi masa depan ekonomi Amerika Serikat, karena pesatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut (Goldberg, 10 Maret 2016). Hillary Clinton yang menjabat sebagai Sekretaris Negara Amerika Serikat pada tahun 2009-2013 mengatakan bahwa kawasan Asia-Pasifik yang menampung hampir separuh dari jumlah populasi di dunia ini sudah menjadi pemain utama dalam perpolitikan global belakangan ini, di mana negara-negara di kawasan tersebut juga turut serta dalam mengerjakan perekonomian dunia, dan juga turut berkontribusi pada besarnya gas rumah kaca (Clinton, 11 Oktober 2011). Menurut beliau, faktor-faktor tersebut beserta pasar terbuka di Asia, memberikan peluang bagi Amerika Serikat untuk melakukan investasi, perdagangan, maupun akses ke teknologi canggih di kawasan Asia-Pasifik, di mana kemampuan perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat dalam memanfaatkan basis konsumen yang luas dan berkembang di Asia-Pasifik dapat membantu upaya pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang sedang dilanda Resesi Besar pada saat itu. Dalam menjalankan kebijakan *Pivot to Asia*, Clinton mengatakan bahwa ada enam tindakan yang dapat dijalankan, diantaranya adalah memperkuat aliansi keamanan secara bilateral, memperdalam hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara yang bangkit seperti China, terlibat dalam lembaga-lembaga multilateral di tingkat regional, memperluas

perdagangan dan investasi, meningkatkan aktivitas militer di kawasan, serta memajukan demokrasi dan hak asasi manusia.

Oleh karena adanya dorongan untuk dapat terlibat lebih aktif di kawasan Asia-Pasifik, pada 8 November 2010, Presiden Obama sebagai Presiden Amerika Serikat saat itu mengatakan dalam pidatonya di hadapan para anggota parlemen India, bahwa:

"India and the United States can partner in Asia. Today, the United States is once again playing a leadership role in Asia—strengthening old alliances; deepening relationships, as we are doing with China; and we're reengaging with regional organizations like ASEAN and joining the East Asia Summit—organizations in which India is also a partner. Like your neighbors in Southeast Asia, we want India not only to 'look East', we want India to 'engage East'—because it will increase the security and prosperity of all our nations." (Obama, 8 November 2010).

Presiden Obama juga kemudian menyinggung situasi di Myanmar pada saat itu terkait dengan keinginannya, di mana beliau mengatakan bahwa sebagai kekuatan demokrasi terbesar di dunia, sudah seharusnya pemerintah Amerika Serikat dan India bertindak dalam menanggapi upaya represi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar kepada kelompok pro-demokrasi di negara tersebut, dan juga pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Terkait dengan keinginan Presiden Obama supaya India dapat berperan lebih aktif dalam *Look East Policy*-nya, Sekretaris Negara Clinton menegaskan kembali dalam pidatonya di Anna Centenary Library, yang terletak di Chennai (India) pada 20 Juli 2011, di mana beliau mengatakan:

"India's leadership will help to shape positively the future of the Asia Pacific. That's why the United States supports India's Look East policy, and we encourage India not just to look East, but to engage East and act East as well, because after all, India, like the United States, where we look to the Atlantic and to the Pacific, also looks both east and west. And its leadership in

South and Central Asia is critically important” (Clinton, 20 Juli 2011).

Ketika Narendra Modi terpilih sebagai Perdana Menteri India pada tahun 2014, hubungan India-Amerika Serikat menjadi semakin dekat, di mana pernyataan bersama antara Amerika Serikat dan India pada 30 September 2014 menyatakan bahwa kebijakan ‘*Act East*’ India dan upaya penyeimbangan kembali AS di kawasan Asia, pemerintah kedua negara tersebut berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah negara-negara Asia-Pasifik lainnya secara lebih erat melalui dialog, konsultasi, maupun latihan militer bersama (The White House, 30 September 2014). Pemerintah India dan Amerika Serikat juga menekankan pentingnya dialog trilateral mereka dengan Jepang, dan mereka juga memutuskan untuk menjelajahi kemungkinan untuk mengadakan dialog tersebut diantara menteri luar negeri dari ketiga negara.

Terkait dengan arsitektur ekonomi dan strategis regional yang berusaha untuk mengikuti arus multilateralisme yang kuat, hal itu dapat terlihat pada KTT India-ASEAN ke-10 pada 21 Desember 2012, di mana pemerintah India dan ASEAN telah sepakat untuk meningkatkan hubungan mereka menuju tingkat hubungan strategis, seperti yang tertuang dalam *Vision Statement of the ASEAN-India Commemorative Summit* (Association of Southeast Asian Nations, 21 Desember 2012). Pernyataan itu juga menyatakan bahwa pemerintah India dan ASEAN juga bertekad untuk menerapkan Hubungan Dialog ASEAN-India secara penuh, efektif, dan tepat waktu, baik dalam spektrum politik dan keamanan, ekonomi, sosial-budaya, maupun pembangunan, melalui penguatan mekanisme institusi-institusi yang relevan dan memperluas jaringan antara institusi-institusi pemerintahan, anggota parlemen, lingkaran bisnis, para ilmuwan, berbagai lembaga think-tank, media, pemuda, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan, demi membangun komunitas yang damai, harmonis, saling peduli dan berbagi di kawasan India-ASEAN.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap *Act East Policy* dengan menggunakan perspektif Kalevi J. Holsti, secara umum dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal yang mendorong pemerintah India untuk meluncurkan *Act East Policy* adalah untuk menghadapi peningkatan hegemoni China sejak beberapa dekade belakangan, terlebih lagi setelah meningkatnya aktivitas maritim China di Samudera Hindia dan diluncurkannya *Belt and Road Initiative*. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga mendorong India untuk dapat berperan lebih aktif di kawasan Asia-Pasifik guna dapat membantu Amerika Serikat dalam menandingi hegemoni China di kawasan tersebut. Sedangkan secara internal, pemerintah India juga merasa bahwa pembangunan di kawasan timur laut India yang cenderung terisolasi juga perlu ditingkatkan, supaya masyarakat di kawasan tersebut dapat menjadi lebih sejahtera, serta konflik bersenjata yang sudah melanda di kawasan tersebut dapat berkurang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya tawar bagi India secara umum maupun kawasan timur laut India secara khusus, konektivitas dengan negara-negara di sebelah timur India perlu ditingkatkan, baik dari sisi ekonomi, politik, kebudayaan, maupun strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alden, C., & Aran, A. (2017). *Foreign Policy Analysis: New Approaches*. New York, NY: Routledge.
- Association of Southeast Asian Nations. (2012, Desember 21). *Vision Statement ASEAN India Commemorative Summit*. Dipetik Agustus 18, 2022, dari Association of Southeast Asian Nations: <https://asean.org/vision-statement-asean-india-commemorative-summit/>
- Association of Southeast Asian Nations. (2015, Agustus 5). *Plan of Action to Implement The ASEAN-India Partnership for Peace, Progress, and Shared Prosperity (2016-2020)*. Dipetik September 18, 2022, dari Association of Southeast Asian Nations: <https://asean.org/wp-content/uploads/images/2015/August/POA>

- _India/ASEAN-India%20POA%20-%20FINAL.pdf
- Ayoob, M. (1990). *India and Southeast Asia: Indian Perceptions and Policies*. London: Routledge.
- Bajpae, C. (2017). Dephasing India's Look East/Act East Policy. *Contemporary Southeast Asia*, 39(2), 348-372.
- Clinton, H. (2011, Juli 20). *Remarks on India and the United States: A Vision for the 21st Century*. Dipetik September 3, 2022, dari U.S. Department of State: <https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/07/168840.htm>
- Clinton, H. (2011, Oktober 11). *America's Pacific Century*. Dipetik September 1, 2022, dari Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2011/10/11/america-pacific-century/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. London: SAGE Publications.
- Desai, S. (2017, November 18). *Revisiting ASEAN-India Relations*. Dipetik Oktober 27, 2022, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2017/11/revisiting-asean-india-relations/>
- Frankel, F. R. (2020). *When Nehru Looked East*. New York: Oxford University Press.
- Ganguly, S. (2017). Has Modi Truly Changed India's Foreign Policy? *The Washington Quarterly*, 40(2), 131-143. doi:10.1080/0163660X.2017.1328929
- Garver, J. W. (2016). *China's Quest: The History of the Foreign Relations of the People's Republic of China*. New York: Oxford University Press.
- Ghosh, A. (2009). The New India-US Relationship. Dalam A. Ghosh, T. Chakraborti, A. J. Majumdar, & C. Shibashis, *India's Foreign Policy* (hal. 137-156). Delhi: Pearson Education.
- Goldberg, J. (2016, April). *The Obama Doctrine*. Dipetik September 1, 2022, dari The Atlantic: <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/#2>
- Gordon, S. (1995). *India's Rise to Power in the Twentieth Century and Beyond*. New York: St. Martin's Press.
- Grare, F. (2001). In Search of a Role: India and the ASEAN Regional Forum. Dalam F. Grare, & A. Mattoo, *India and ASEAN: The Politics of India's Look East Policy* (hal. 119-145). New Delhi: Manohar.
- Haokip, T. (2011). India's Look East Policy: Its Evolution and Approach. *South Asian Survey*, 239-257. doi:10.1177/0971523113513368
- Holsti, K. J. (1992). *International Politics: A Framework for Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.
- Jackson, R., & Sørensen, G. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- Khalid, K. M., Wei, J. L., & Suzuki, A. (2015). Three Decades of Malaysia-Japan Relations (1981-2011): Crossed Interests and Missed Opportunities. *Journal of Asia Pacific Studies*, 73-100.
- Kugiel, P. (2017). *India's Soft Power: A New Foreign Policy Strategy*. London: Routledge.
- Kumar, N. (2015, Mei 7). *How Narendra Modi Wants to Change India*. Dipetik Oktober 15, 2022, dari Time: <https://time.com/magazine/us/3849941/may-18th-2015-vol-185-no-18-u-s/>
- Kumar, Y. (2020). India and the Indian Ocean. Dalam A. Gupta, & A. Wadhwa, *India's Foreign Policy: Surviving in a Turbulent World* (hal. 357-372). New Delhi: SAGE Publications India.
- Li, M. (2015). The People's Liberation Army and China's Smart Power Quandary in Southeast Asia. *Journal of Strategic Studies*, 359-382.
- McGarr, P. (2013). *The Cold War in South Asia: Britain, the United States and the Indian Subcontinent, 1945-1965*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Michael, A. (2013). *India's Foreign Policy and Regional Multilateralism*. New York: Palgrave Macmillan.
- Ministry of External Affairs of India. (2003, September 29). *Speech by External Affairs Minister Shri Yashwant Sinha at Harvard University*. Dipetik Februari 7, 2022, dari Ministry of External Affairs of India: https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/4744/Speech_by_External_Affairs_Minister_Shri_Yashwant_Sinha_at_Harvard_University
- Ministry of External Affairs of India. (2014, Desember 16). *Address by Secretary (East) at the Inaugural Session of the International Relations Conference on 'India's Look East*

- *Act East Policy: A Bridge to the Asian Neighbourhood* (Pune, December 13, 2014). Dipetik September 5, 2022, dari Ministry of External Affairs of India: <https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/24531/address+by+secretary+east+at+the+inaugural+session+of+the+international+relations+conference+on+indias+look+east++act+east+policy+a+bridge+to+the+asian+neighbourhood+pune+december+13+2014>
- Ministry of External Affairs of India. (2014, November 12). *Opening Statement by Prime Minister at the 12th India-ASEAN Summit, Nay Pyi Taw, Myanmar*. Dipetik Agustus 22, 2022, dari Ministry of External Affairs of India: <https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/24230/opening+statement+by+prime+minister+at+the+12th+india+sean+summit+nay+pyi+taw+myanmar>
- Ministry of External Affairs of India. (2014, November 13). *Prime Minister's remarks at the 9th East Asia Summit, Nay Pyi Taw, Myanmar*. Dipetik April 29, 2021, dari Ministry of External Affairs of India: <https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/24238/prime+ministers+remarks+at+the+9th+east+asia+summit+nay+pyi+taw+myanmar>
- Ministry of External Affairs of India. (2014, November 12). *Remarks by the Prime Minister at 12th India-ASEAN Summit, Nay Pyi Taw, Myanmar*. Dipetik September 21, 2022, dari Ministry of External Affairs of India: <https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/24236/remarks+by+the+prime+minister+at+12th+india+asean+summit+nay+pyi+taw+myanmar>
- Ministry of External Affairs of India. (2015, November 23). *37th Singapore Lecture 'India's Singapore Story' by Prime Minister during his visit to Singapore (November 23, 2015)*. Dipetik September 29, 2022, dari Ministry of External Affairs of India: <https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/26058/37th+singapore+lecture+indias+singapore+story+by+prime+minister+during+his+visit+to+singapore+november+23+2015>
- Ministry of External Affairs of India. (2015, Desember 23). *QUESTION NO.4062. ACT EAST POLICY*. Dipetik Agustus 26, 2022, dari Ministry of External Affairs of India: <https://www.mea.gov.in/lok-sabha.htm?dtl/26237/question+no4062+act+east+policy>
- Ministry of External Affairs of India. (2018, Januari 25). *Delhi Declaration of the ASEAN-India Commemorative Summit to mark the 25th Anniversary of ASEAN-India Dialogue Relations*. Dipetik September 22, 2022, dari Ministry of External Affairs of India: <https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/29386/delhi+declaration+of+the+asean+india+commemorative+summit+to+mark+the+25th+anniversary+of+asean+india+dialogue+relations>
- Ministry of External Affairs of India. (2018, Juni 1). *Prime Minister's Keynote Address at Shangri La Dialogue (June 01, 2018)*. Dipetik Oktober 4, 2022, dari Ministry of External Affairs of India: <https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/29943/Prime+Ministers+Keynote+Address+at+Shangri+La+Dialogue+June+01+2018>
- Ministry of External Affairs of India. (2018, Desember 13). *QUESTION NO.344 SYNERGY BETWEEN OBOR-ACT EAST POLICY*. Dipetik April 8, 2021, dari Ministry of External Affairs of India: <https://www.mea.gov.in/rajya-sabha.htm?dtl/30716/question+no344+synergy+between+obor+act+east+policy>
- Ministry of External Affairs of India. (2021, Maret 18). *Address by Secretary (East) at the Virtual Seminar on Connectivity Cooperation for a Free, Open and Inclusive Indo-Pacific*. Dipetik Oktober 11, 2022, dari Ministry of External Affairs of India: <https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/33680/address+by+secretary+east+at+the+virtual+seminar+on+connectivity+cooperation+for+a+free+open+and+inclusive+indopacific>
- Ministry of External Affairs of India. (2021, Juli 6). *Keynote Address by Secretary (East) at the Special Session of the 1st edition of the Indo-Pacific Business Summit*. Dipetik Oktober 11, 2022, dari Ministry of External Affairs of India: <https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/33982/keynote+address+by+secretary+east+at+the+special+session+of+the+1st+edition+of+the+indopacific+business+summit>
- Ministry of External Affairs of India. (2021, Agustus 8). *Prime Minister to chair UN*

- Security Council High-Level Open Debate on "Enhancing Maritime Security: A Case For International Cooperation".* Dipetik Oktober 10, 2022, dari Ministry of External Affairs of India: <https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/34149/prime+minister+to+chair+un+security+council+highlevel+open+debate+on+enhancing+maritime+security+a+case+for+international+cooperation>
- Mohan, C. R. (2003). *Crossing the Rubicon: The Shaping of India's New Foreign Policy*. New Delhi: Penguin Books India.
- Mohan, C. R. (2006). India and the Balance of Power. *Foreign Affairs*, 85(4), 17-32.
- Muni, S. D., & Mishra, R. (2019). *India's Eastward Engagement: From Antiquity to Act East Policy*. New Delhi: SAGE Publications India Pvt Ltd.
- Naidu, G. V. (2004). Whither the Look East Policy: India and Southeast Asia 331. *Strategic Analysis*, 28(2), 331-346.
- Obama, B. (2010, November 8). *Remarks by the President to the Joint Session of the Indian Parliament in New Delhi, India*. Dipetik September 2, 2022, dari The White House: President Barack Obama: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2010/11/08/remarks-president-joint-session-indian-parliament-new-delhi-india>
- Our World in Data. (2022, Oktober 4). *Population & Demography Data Explorer: Visualizing data from the United Nations World Population Prospects*. Dipetik Oktober 4, 2022, dari Our World in Data: <https://ourworldindata.org/explorers/population-and-demography>
- Singh, H. S. (2014, Mei 20). *Narendra Modi appointed as India's prime minister*. Dipetik Oktober 15, 2022, dari CNN: <https://edition.cnn.com/2014/05/20/world/asia/india-modi/index.html>
- Singh, M. (2021, November 7). *Army steps up efforts to safeguard Siliguri Corridor*. Dipetik Oktober 7, 2022, dari The New Indian Express: <https://www.newindianexpress.com/the-sunday-standard/2021/nov/07/army-steps-up-efforts-to-safeguard-siliguri-corridor-2380383.html>
- The Economic Times. (2014, Agustus 26). *Sushma Swaraj tells Indian envoys to Act East and not just Look East*. Dipetik Agustus 22, 2022, dari The Economic Times: https://economictimes.indiatimes.com/article/show/40907671.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
- The White House. (2014, September 30). *U.S.-India Joint Statement*. Dipetik September 4, 2022, dari The White House: President Barack Obama: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/09/30/us-india-joint-statement>
- The World Bank. (2018, Maret 29). *Belt and Road Initiative*. Dipetik Agustus 8, 2022, dari The World Bank: <https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative>

BIOGRAFI

Meizaro Tifira Akbar adalah mahasiswa angkatan 2017 di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Tertarik pada analisis kebijakan luar negeri dan juga tertarik pada perkembangan geopolitik di kawasan Asia-Pasifik.

Nuraeni adalah dosen di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.